

PERLAWANAN RAKYAT BENGKULU TERHADAP KOLONIALISME BARAT 1800-1978

R. Ade Hapriwijaya
Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Bengkulu
Jln. Pembangunan No. 1 Padang Harapan, Bengkulu 38255
hapriwijaya@gmail.com

Abstract: *Competition of Bengkulu People to West Colonialism 1800-1978.* The Dutch government is also trying to shape a new village governmental system by enacting the Law of the Simbur of Light and the distribution of Marga for Lais area. Although this was done after the Dutch held elimination of the kingdom that existed in the area of Bengkulu, the Lemau River Kingdom, River Itam, Silebar and The creek, which began in 1881 to 1870. In addition, the killing was also caused by Dutch government policy in the field ekonomi, namely in the problem of forced cultivation, which begins in 1833, and required it in 1872 and in its place the Dutch government decided Tax Head, so the welfare of the people decreases, and this causes the movement the killing of a colonial official in Bengkulu. The Dutch attempt to enact the Light Simbur Law is acceptable after the first amendment of the Articles which is in the law. This was the defeat of the Dutch government in participating regulate traditional life in Bengkulu.

Keywords: *Resistance, People, Bengkulu, Western Colonial.*

Abstrak: *Perlawanan Rakyat Bengkulu terhadap Kolonialisme Barat 1800-1978.* Pemerintah Belanda juga berusaha untuk membentuk suatu sistem pemerintahan desa yang baru dengan jalan memberlakukan Undang-Undang Simbur Cahaya dan pembagian marga untuk daerah Lais. Walaupun cara ini dilakukan Belanda setelah diadakan penghapusan kerajaan yang ada di daerah Bengkulu, yaitu Kerajaan Sungai Lemau, Sungai Itam, Silebar dan Anak Sungai, yang dimulai tahun 1881 hingga 1870. Selain itu, pembunuhan ini juga disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah Belanda dalam bidang ekonomi, yaitu dalam masalah tanam paksa, yang dimulai pada tahun 1833, serta diharuskan pada tahun 1872 dan sebagai gantinya pemerintah Belanda menetapkan pajak Kepala, sehingga kemakmuran masyarakat menurun, dan ini menyebabkan terjadinya gerakan pembunuhan terhadap pejabat kolonial di Bengkulu. Usaha Belanda untuk memberlakukan Undang-undang Simbur Cahaya dapat diterima setelah terlebih dahulu dilakukan perbaikan terhadap pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut. Ini merupakan kekalahan pemerintah Belanda dalam ikut serta mengatur kehidupan adat yang ada di Bengkulu.

Kata Kunci: *Perlawanan, Rakyat, Bengkulu, Kolonial Barat.*

Pendahuluan

Sejarah nasional Indonesia selalu mengenang peristiwa yang terjadi antara bangsa Indonesia dengan penjajahnya. Dalam abad ke-19 banyak sekali gerakan yang berusaha untuk menantang pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Gerakan ini dilakukan oleh sekelompok orang, dengan tujuan untuk melawan kebijakan pemerintah Belanda. Akan tetapi kebanyakan gerakan yang telah diteliti oleh ahli sejarah adalah gerakan

petani, seperti pemberontakan petani banten 1888, pemberontakan Ciomas 1886, Bekasi 1869, dan sebagainya. Gerakan petani ini dapat dikatakan sebagai gerakan sosial.¹

Bila kita perhatikan gerakan sosial yang dilakukan, termasuk juga melakukan pembunuhan terhadap penguasa, khususnya Belanda. Salah satu gerakan yang berusaha untuk membunuh pimpinan Belanda di suatu daerah terjadi di Bengkulu pada tahun 1873.²

Seandainya kita melihat pada historiografi Indonesia, masalah gerakan sosial dapat dikatakan masih baru, sebab pada awal tahun 1970-an gerakan sosial baru mendapat perhatian. Pada masa sebelumnya gerakan sosial kurang mendapat perhatian.

Penulisan sejarah sosial dalam sejarah Indonesia merupakan penulisan sejarah daerah, karena banyak kejadian-kejadian historis terjadi pada tingkat lokal (daerah). Sebenarnya pada tingkat lokal lah praktek politik kolonial dapat di perlihatkan. Hal ini merupakan dimensi dari sejarah Nasional, sebagai contoh dapat dikemukakan; gerakan sosial merupakan reaksi atas westernisasi, seperti: introduksi pajak, sewa tanah, birokrasi, modern, dan sebagainya.³ Dalam menanggapi masalah ini yang penting bagaimana reaksi penduduk pedesaan terhadap sistem baru tersebut.

Penulisan sejarah lokal cukup menarik, karena erat hubungannya dengan struktur masyarakat, dan adat istiadat setempat. Sebagaimana di daerah lain, maka di daerah Bengkulu juga terjadi gerakan yang menentang pemerintah Belanda, akan tetapi cara yang digunakan bukan gerakan Petani, tetapi dilakukan oleh para kepala marga (Pasirah). Pembunuhan ini erat kaitannya dengan berkurangnya pengaruh kepala Marga, dan menguntungkan asisten Residen dan Kontrolleur. Para kepala marga ini bisa juga di sebut lawan diam-diam dengan sendirinya. Pembunuhan pejabat kolonial yang terjadi di Bengkulu cukup menarik, karena dalam kasus ini di lakukan oleh para kepala Marga, tanpa menghiraukan ada tidaknya dukungan rakyat. Keterlibatan para Pasirah dalam gerakan

pembunuhan berkaitan dengan adat yang berlaku di daerah Bengkulu.

Selain itu, politik pemerintah Hindia Belanda yang berusaha untuk memperoleh keuntungan dari rakyat Bengkulu yang baru di dapat dari pemerintah Inggris berdasarkan *Traktat London* 17 Maret 1824.⁴ Tindakan pemerintah Belanda melakukan sistem tanam paksa yang tertera dalam *Staatsblad* 1834 no. 22.⁵ Selain masalah ekonomi pemerintah Hindia Belanda juga mempengaruhi adat istiadat setempat yang dimulai tahun 1832, yaitu pada masa pemerintahan Asisten Residen Knoerle (1832-1833) dengan mengatur kembali sistem pemerintahan, sistem hukum yang ada pada masyarakat (hukum adat) dan berusaha untuk melenyapkan lembaga tradisional, seperti dewan pangeran.⁶

Kebijakan ini di tempuh untuk menggantikan pemerintahan yang lebih sesuai dengan kepentingan Belanda, dimana sistem pemerintahan yang ada di Bengkulu sebelumnya di nilai oleh Belanda kurang baik. Oleh karena itu Belanda ingin membangun suatu pemerintahan baru yang dapat dijadikan lingkaran budaya di antara pemimpin daerah dengan pimpinan kolonial Belanda. Untuk itu pemerintah Belanda berusaha untuk mengganti semua ketua adat atau kepala daerah yang ada di Bengkulu, dengan tujuan terciptanya suatu sistem masyarakat yang baru. Dengan kata lain personalia pemerintahan daerah yang dapat bekerja sama dengan Belanda.

Pembentukan sistem pemerintahan baru di dalam masyarakat akan menguntungkan pihak kolonial. Karena adanya kombinasi kepentingan tradisional

dengan kekuatan kolonial bersatu, yang akan melahirkan suatu hukum adat baru. Dengan demikian akan terciptalah para pegawai pemerintahan baru yang merupakan agen dari pemerintah kolonial. Pergantian sistem pemerintahan yang digabungkan dengan hukum adat lebih dikenal sistem *Schakel Society*.⁷ Usaha pemerintah Belanda untuk membentuk sistem pemerintahan baru, khususnya mengenai pengangkatan kepala marga mulai dilakukan pada tahun 1861. Pada tahun 1861 pemerintah Hindia Belanda mengatur tentang pemilihan kepala marga dan kepala dusun (Depati). Dengan mengatur pengangkatan kepala dusun dan kepala marga, Belanda akan mendapat keuntungan dari mereka.⁸

Pembahasan

Uraian tentang perlawanan rakyat Bengkulu terhadap kolonialisme Barat 1800-1873 serta tindakan pemerintah Belanda setelah pembunuhan akan dibahas dalam bab ini. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa di Bengkulu telah terjadi suatu "tradisi pembunuhan" terhadap para pimpinan kolonial (residen pada masa Inggris dan asisten residen pada masa kolonial Belanda) dari tahun 1807 sampai tahun 1873. Pembunuhan tiga pejabat (Residen dan asisten Residen), untuk menjelaskan tentang kebijakan yang tidak di senangi akan membawa peristiwa pembunuhan terhadap penguasa di Bengkulu.

Tinjauan terhadap tiga kali pembunuhan yang terjadi, dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa di daerah Bengkulu terdapat suatu kontinuitas dalam usaha menantang pemimpin

kolonial di Bengkulu. Adanya kontinuitas ini didasarkan kepada pertentangan antara kepentingan politik kolonial Belanda dengan kepentingan masyarakat Bengkulu.

Kepentingan pemerintah kolonial Belanda di Bengkulu yang kurang berkenan di dalam masyarakat dimulai tahun 1833, ketika kebijakan ekonomi tanam paksa dan pengurangan tunjangan terhadap keempat pembesar pribumi yang ada, yaitu pangeran Sungai Lemau, pangeran Sungan Itam, Pangeran Selebar dan Sultan Anak Sungai. Kemudian pada tahun 1861 hingga tahun 1872, diadakan penghapusan wilayah empat kerajaan di wilayah Bengkulu. Kebijakan ini diikuti juga dengan pola baru dalam sistem pemerintahan desa, yaitu digunakan sistem marga serta kebijakan baru dalam mengisi kas pemerintah Belanda dengan penarikan pajak kepala yang dimulai tahun 1873.

1. Pembunuhan 1807 - 1873

1.1 Pembunuhan Residen Thomas Parr 1807

Keadaan ekonomi yang sulit melanda wilayah Inggris di Pantai Barat Sumatra pada akhir abad ke 18. Kesulitan ekonomi di wilayah Bengkulu, berasal dari korupsi yang dilakukan pegawai pemerintah, baik pegawai Eropa maupun pegawai pribumi. Guna menanggulangi keuangan, pemerintah Inggris di Benggala mengutus Walter Ewer untuk menjadi Residen di Bengkulu pada tahun 1800. Selain itu, Ewer di beri kuasa penuh untuk menanggulangi keadaan yang terjadi di dalam dewan pangeran. Sedangkan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, Ewer melaksanakan tanam paksa yang di berlakukan di distrik Sungai Lemau, Sungan Itam, dan Selebar

pada abad ke-19 seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Akibat dari tanam paksa tahun 1803, hubungan antara Residen Ewer dengan masyarakat Sungai Itam kurang baik, karena rakyat di Sungai Itam menolak perintah Residen untuk melaksanakan tanam paksa lada. Dengan adanya penolakan ini, membuat pangeran Sungai Itam (Pangeran kalipa Raja) mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pemasukan dari hasil lada yang cukup besar.

Penolakan untuk menanam lada terus dilakukan oleh rakyat Sungai Itam. Ketika terjadi pergantian residen di Bengkulu pada tahun 1805, Ewer di gantikan oleh Thomas Parr, Pangeran Sungai Itam meminta bantuan kepada residen untuk memberi hukuman kepada rakyat yang tidak mau menanam Lada. Permintaan bantuan kepada pemerintah Inggris di sebabkan rasa tidak senang Pangeran Sungai Itam melihat kemajuan yang di dapat pangeran Sungai Lemau, yang mendapat keuntungan materi yang mencolok dari hasil tanam paksa lada.

Sebenarnya RESIDEN PARR sendiri sebelum datang ke Bengkulu, ia telah punya rencana sendiri yang akan dilaksanakan di wilayah Bengkulu yaitu menggalakan penanaman kopi. Dengan adanya masukan tentang rakyat yang tidak mau menanam Lada, merupakan kesempatan bagi Residen Parr untuk mengembangkan tanaman kopi.⁹

Dengan adanya perintah baru Dari Residen, maka untuk wilayah sungai Itam tanaman paksa lada tidak di berlakukan dan di ganti oleh tanaman Kopi. Perintah ini juga di tolak oleh rakyat Sungai Itam dan menyebabkan jurang pemisah yang

bertambah dalam antara pangeran Sungai Itam dengan rakyatnya.

Hubungan yang erat antara pemerintah Inggris dengan pangeran Sungai Itam merupakan suatu jalan untuk menguasai wilayah sungai Itam secara keseluruhan, baik ekonomi maupun politik. Hingga dengan adanya intervensi sistem penjajahan didalam kerajaan Sungai Itam menyebabkan pertentangan antara rakyat dengan pangeran.

Hubungan yang kurang baik antara pangeran dengan rakyat Sungai Itam, di manfaatkan oleh Depati Dusun Besar. Depati Dusun Besar merupakan seorang yang di anggap selalu merintangai kepentingan pemerintah dan pangeran atau dapat dikatakan antara pangeran dan residen merupakan musuh Depati. Rasa tidak senang depati terhadap Residen Parr dan pangeran berawal ketika depati mengadili penduduk dari Desa Dua Belas dan Selapan, dimana depati mengusulkan dengan denda uang (bangun) tanpa melalui Pengadilan Pangeran. Akibatnya depati di ajukan ke muka pengadilan Pangeran serta di tahan di dalam penjara dengan alasan Mengabaikan Pengadilan.¹⁰

Ketegangan yang bertamabah memuncak antara pemerintah Parr dengan rakyat Sungai Itam, bertepatan dengan pecahnya hubungan antara pemerintah Inggris dengan Daeng Mabella. Daeng Mabella yang menjabat sebagai Kapten Bugis dituduh telah menggelapkan uang yang di titipkan kepadanya, uang tersebut sebenarnya akan disampaikan keluar ibukota. Karena alasan tersebut maka Residen Parr memecatnya dari jabatan Kapten Bugis dan secara langsung jabatannya di dalam pengadilan pangeran hilang. Hukuman

tersebut merupakan pukulan bagi keluarga Bugis tersebut yang telah menjadi sekutu pemerintah sejak abad ke 18.¹¹

Melihat tindakan pemerintah terhadap rakyat Sungai Itam terus dilakukan, maka pada bulan Desember 1807 bermunculan kelompok-kelompok bersenjata di wilayah Sungai Itam. Keadaan ini di beritahukan kepada Residen Parr. Untuk meredakan ketegangan, Residen Parr mengundang Depati Dusun Besar untuk mengadakan tukar pikiran, tetapi gagal. Setelah gagal untuk mengadakan perundingan maka pada tanggal 22 Desember 1807 terjadi peristiwa pembakaran kantor kompeni Inggris di Bintunan.

Sehari sebelum terjadi pembakaran kantor Inggris di Bintunan, Residen Parr telah memerintahkan kepada Perreau (orang Inggris), yang menjabat sebagai penguasa tanam paksa agar memberitahu kepada pangeran Sungai Itam dan memperingatkan agar jangan menggunakan kekerasan dalam penanaman kopi. Setelah Pangeran Sungai Itam melakukan rapat dengan Perreau, pada tanggal 23 Perreau menerima surat dari residen agar menunda semua perintah yang di keluarkan sebelumnya,¹² tetapi pengumuman untuk masyarakat Sungai Lemau datangnya terlambat. Di lain pihak rakyat Sungai Itam merencanakan untuk bergerak menuju ibu kota. Pada malam hari tanggal 27 Desember 1807, rakyat Sungai Itam yang berjumlah 300 orang,¹³ melakukan serangan terhadap kediaman Residen Parr di Mount Fellix, serta membunuh residen, yang di anggap penyebab dari kesulitan- kesulitan mereka.

Penyerangan ke Mount Fellix di pimpin oleh Depati Sukarami, Depati Lagan, dan Depati Pagar dewa. Depati Lagan dan Depati Pagar Dewa gugur dalam pertempuran di Mount Fellix. Sedangkan yang di percayakan untuk membunuh Residen Parr adalah Si Anjut dan Si Banjar, saudara Depati Sukarami, di tangkap di Musi, tetapi meninggal setelah mengadakan perlawanan. Satu-satunya pemimpin yang dapat ditahan hidup-hidup adalah Depati Sukamari.

Untuk menyelidiki peristiwa tersebut maka pemerintah ingris membentuk panitia penyelidikan yang terdiri dari R.S Perreau, Hendry Heath dan Mr. R Alphinstone. Panitia ini dalam tugasnya banyak mendapat hambatan karena tidak terdapat bukti-bukti dari para pelaku utama pembunuhan tersebut.¹⁴ Dalam penyelidikan yang di lakukan terhadap Depati Sukarami di dapat keterangan bahwa penghasut utama dari rencana tersebut adalah Daeng Mabella sendiri. Dengan alasan bahwa Kapten Bugis tersebut mempunyai rasa dendam terhadap Parr. Karena memecatnya dari pekerjaan serta statusnya, dan mendapatkan sekutu yang bersedia bekerjasama yaitu Depati Dusun Besar, Daeng Mabella kemudian membina hubungan dengan Dusun Sukarami, dimana mendapat rasa tidak senang terhadap peraturan penanaman kopi. Depati Sukarami menjelaskan bahwa ia pribadi tidak pergi menemui Daeng, tetapi Daeng datang membawa misinya ke Dusun Sukarami dengan perantara Raja Lelo (Si Banjar) yang menjadi pelaku utama Pembunuhan Residen Parr. Dalam mencari pendukung di janjikan akan mendapat uang ganjaran sebesar 500

dollar Spanyol serta hadiah kepada raja lelo sebuah cincin sebagai jaminan.

Dengan adanya pernyataan Depati Sukarami, maka Daeng Mabella di panggil oleh residen. Kapten Bugis memberi pengakuan, bahwa pemecatan tersebut memberikan penghinaan kepadanya, akan tetapi tidak ada rasa permusuhan dan rasa balas dendam terhadap kompeni. Bila ia hendak mencari pengikut dan membunuh residen, ia akan mencari pengikut di kalangan rakyat Sungai Lemau, dimana Daeng mempunyai pengaruh yang besar, bila di banding rakyat Sungai Itam, yang justru merupakan musuhnya. Demikian pula pangeran Sungan Lemau dan Pangeran Sungai Itam, mereka tidak mengetahui dan tidak melihat bukti-bukti yang dapat memberatkan kecurigaan terhadap Daeng.

Pembunuhan terhadap Residen Parr, merupakan salah satu sebab dari masuknya sistem penjajahan di Bengkulu. Secara tidak langsung masuknya sistem penjajahan menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam sistem pemerintahan di Sungai Itam, dimana Pangeran Sungai Itam menghendaki agar kekuasaannya atas rakyat dapat terus di laksanakan. Pertentangan antara rakyat dan pangeran membawa dampak yang jelek bagi sistem pemerintahan di Sungai Itam, dimana pangeran meminta bantuan kepada pemerintah Inggris agar mau membantu Pangeran mengatasi rakyat yang tidak mau menanam lada.

Selain itu, perselisihan antara Depati Dusun Besar dengan Pangeran merupakan sisi lain dari Pembunuhan Residen Parr. Perselisihan antara Depati Dusun Besar, sebagai akibat permohonan depati tentang pemanfaatan denda uang

darah (bangunan) tanpa harus melewati pengadilan pangeran di Fort Marlborough, dimana pangeran sungai Itam juga duduk sebagai ketua pengadilan bersama dengan Pangern sungai lemau di tolak.

Setelah pembunuhan Residen Parr, terlihat adanya Depati yang memfitnah Daeng Mabella juga terlibat dalam usaha pembunuhan Residen Parr. Fitnah ini terjadi karena Depati Sukarami melihat antara hubungan antara Daeng Mabella dengan pemerintahan Inggris sudah berkurang. Bila kita memperhatikan keadaan di Bengkulu sebelumnya, Daeng Mabella dan keturunannya memainkan peranan dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian maka pengaruh dari pada Depati terhadap Pemerintah Inggris kurang. Sehingga menimbulkan iri hati dari para Depati di wilayah Sungai itam.

1.2. Pembunuhan 1833

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai kebijakan pemerintah Hindia Belanda, khususnya Asisten Residen Knoerle di Bengkulu menimbulkan pertentangan dari rakyat khusus nya rakyat dari Sungai Lemau.

Tindakan Knoerle yang banyak mendapat sorotan dari rakyat Sungai Lemau adalah setelah pangeran Linggang Alam meninggal tahun 1833. Untuk mempertahankan kepentingan Belanda di Sungai Lemau Belanda mengangkat Depati Payung Negara, yang masih keluarga kerabat Pangeran Linggang Alam sebagai gantinya tetapi kurang di senangi oleh rakyat.

Tindakan menyingkirkan keturunan pangeran Linggang Alam, menyebabkan rakyat Sungai Lemau bersama sama melakukan pembunuhan atas diri Asisten

Residen Knoerle tanggal 16 April 1833 di Dusun Tanjung ketika sedang melakukan perjalanan dinas. Pembunuhan asisten Residen Knoerle juga disebabkan oleh tingkah lakunya yang dianggap tidak baik oleh rakyat.¹⁵

Menurut sumber pemerintah Belanda, setelah pembunuhan Asisten Residen Knoerle, Letnan Gubernur Jendral memperbaharui sistem penanaman, dimana jumlah wajib tanam dikurangi menjadi 500 pohon dan 250 pikul. Selain itu Vanden Bosch mengeluarkan keputusan baru pada tanggal 14 Oktober 1833 No. 36 tentang pembayaran f.2 hingga f.4 per tahun untuk setiap orang sebagai ganti penurunan wajib tanam yang dikurangi dari 1000 Pohon dan 500 pikul.¹⁶ Sedangkan untuk melindungi harga kopi dan lada, pemerintah menetapkan f.15 per pikul kopi dan f.7 per pikul Lada. Dari harga yang telah ditetapkan tersebut Depati mendapat premi sebesar f.1 per pikul kopi dan 50 sen per pikul Lada.¹⁷

Setelah pembunuhan asisten Residen Knoerle pemerintah tidak melakukan tindakan lebih lanjut, seperti penyerangan terhadap daerah Tanjung. Akan tetapi pemerintah Belanda hanya memperbarui kebijakan wajib tanam di daerah Bengkulu. Kebijakan pembaharuan sistem tanam ternyata berhasil membawa perubahan di dalam daerah, dimana sebelumnya keadaan kacau berangsur-angsur dapat di atasi oleh asisten Residen E. Francis yang datang ke Bengkulu setelah peristiwa pembunuhan asisten residen Knoerle bersama-sama dengan Letnan gubernur Jendral Vander Bosch dalam perjalanan ke Padang.

Walaupun demikian, usaha untuk menangkap pelaku pembunuhan dilakukan juga, akan tetapi ketika diadakan penangkapan si pembunuh telah mati. Mayat pembunuh di bawa ke Fort Marlborough dan pemerintah Belanda tetap menginginkan agar mayat tersebut di adili di pengadilan pangeran. Untuk mengadili mayat pembunuh asisten Residen Knoerle, pemerintah Belanda mengeluarkan surat keputusan No. 19 tanggal 9 Juli 1833 tentang pengadilan pembunuhan Asisten Residen Knoerle. Dalam sidang pengadilan pangeran diputuskan bahwa si mayat di Hukum gantung di dalam sebuah kandang Besi.¹⁸

Berita tentang pembunuhan Asisten Residen Knoerle juga terdapat di dalam sumber-sumber lokal.¹⁹ Di sebutkan juga bahwa membunuh Knoerle bukan seorang melainkan dilakukan oleh orang banyak ketika sedang melakukan Peninjauan ke desa Tanjung. Ketika di adakan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan, salah seorang dari pembunuh dapat di tangkap, akan tetapi sudah di bunuh terlebih dahulu. Mayatnya di masukkan ke dalam sangkar Besi dan di adili oleh pengadilan Pangeran. Pengadilan memutuskan bahwa mayat harus digantung.

Melihat dari sumber Belanda dan sumber Lokal, kedua sumber menyebutkan bahwa pembunuhan Asisten Residen Knoerle dilakukan sewaktu asisten residen melakukan peninjauan ke Desa Tanjung. Bila memperhatikan sumber Belanda, terlihat bahwa latar belakang dari pembunuh tersebut adalah masalah tanam paksa. Selain itu asisten residen juga mempergunakan tenaga penduduk untuk

pembangunan jalan antara Bengkulu dengan Residen Palembang. Sedangkan menurut sumber lokal pembunuhan Asisten Resident Knoerle disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan dalam menjalankan kebijaksanaan, baik mengenai paksaan yang dilakukan oleh Knoerle ketika membawa Sultan Anak Sungai dari Muko-muko ke Bengkulu pada tahun 1832, maupun dalam masalah tanam paksa.

Keputusan Pengadilan Pangeran tentang hukuman terhadap mayat yang telah melakukan pembunuhan, merupakan suatu kebijaksanaan pemerintah Belanda untuk Menegakan wibawa pemerintahan serta untuk menakuti penduduk agar tidak membunuh Asisten Residen.

1.3. Pembunuhan yang gagal Mei 1873

Dengan menurunnya sumber sumber pemasukan pemerintahan Belanda pada awal tahun 1870, sebagai akibat dari berkurangnya hasil tanaman lada dan kopi di Bengkulu sejak awal 1860, menyebabkan pemerintah Belanda berusaha untuk mencari sumber pemasukan baru. Untuk itu pada tahun 1872 dengan *staatsblad* No. 205 pemerintahan memberlakukan pajak kepala untuk *afdeeling* Bengkulu dan mulai berlaku pada awal tahun 1873.²⁰

Selain memberlakukan pajak kepala yang sangat memberatkan rakyat, karena hasil dari lada dan kopi tidak menguntungkan lagi. Pemerintah Belanda juga mengadakan penghapusan kerajaan sungai lemau, sungai Itam, Selebar dan Muko-muko mulai tahun 1861 hingga 1870. Dengan penghapusan keempat kerajaan ini maka sistem pemerintahan yang ada di Bengkulu tidak ada lagi,

seperti Laporan-laporan di berikan oleh Asisten Resident Bengkulu kepada gubernur Jenderal di Batavia.²¹

Kebijakan untuk membayar pajak kepala menyebabkan berberapa kelompok masyarakat merasa keberatan karena harus memikul beban yang kian terasa, sebagai akibat dari menurunnya penghasilan penduduk. Petugas memungut pajak kepala di tetapkan oleh pemerintah adalah para depati, dengan alasan hubungan depati dengan rakyat lebih dekat. akan tetapi perkiraan pemerintahan Belanda ini meleset, karena di dusun tanjung terdana, bekas wilayah sungai hitam terjadi penolakan untuk membayar pajak kepala yang di pimpin oleh Berniat.

Menurut cerita yang turuntemurun di desa tanjung terdana, Berniat masih keturunan dari pangeran sungai hitam (Pangeran Raja Khalifah). Sejak kerajaan sungai hitam di hapuskan nasib keturunannya tidak di perhatikan lagi.²² cerita rakyat ini sesuai laporan pemerintahaan Belanda yang menyatakan bahwa di Bengkulu tidak ada keturunan bangsawan.²³

Menurut cerita rakyat²⁴, usaha Berniat untuk melawan kebijakan pajak kepala mendapat dukungan dari temanya yang bernama Meradayan. Kedua orang ini kemudian mencari pendukung di kalangan rakyat di tanjung terdana. Setelah mendapat sejumlah pengikut Berniat yang diangkat sebagai pemimpin mereka mulai melakukan latihan untuk mengadakan penyerangan dan pembunuhan Asisten Resident H. C Humme di Fort Marborough.

Setelah persiapan selesai dilakukan, pada tanggal 18 April 1873, malam hari

pasukan Berniat melakukan penyerangan terhadap kediaman Asisten Residen Humme. Akan tetapi Asisten Resident Humme lolos dari usaha pembunuhan ini kegagalan ini di sebabkan oleh strategi yang telah di atur oleh Berniat tidak di patuhi oleh pengikutnya, akibatnya pasukan Berniat sendiri dapat di halau oleh pasukan Belanda. Ketika diadakan pengejaran oleh tentara Belanda pasukan Berniat melarikan diri ke hutan.

Usaha pembunuhan terhadap Asisten Resident Humme, juga di temukan di dalam arsip pemerintahan hindia belanda.²⁵nama Berniat dan Meradayan di anggap sebagai pelaku pemberontakan(of stand) pada bulan april 1873 terhadap Asisten Resident Homme. Setelah mereka melarikan diri, Berniat dan Meradayan sekali-sekali menampakan diri di muka pejabat pemerintah di wilayah Lais, Bengkulu dan sekitarnya.

Usaha pembunuhan yang di lakukan terhadap Asisten residen H.C Humme, merupakan perlawanan rakyat Tanjung Terdana terhadap sistem pajak kepala yang di terapkan pada awal tahun 1873. Perlawanan rakyat tanjung Terdana erat kaitannya dengan keadaan Ekonomi masyarakat pada akhir tahun 1860-an yang terasa sulit karena penghasilan dari Tanaman lada dan kopi menurun Jumlahnya. Hal ini disebabkan banyak pohon-pohon yang telah tua dan tidak diadakan penggantian dengan tanaman yang baru, sehingga masyarakat hanya mengandalkan hasil padinyang tidak besar hasilnya.

1.4 Rencana Pembunuhan Asisten Residen Van Amstal

Setelah terjadi usaha pembunuhan terhadap Asisten Residen Humme 18 April 1873, maka pada bulan mei Humme di ganti oleh Asisten Residen van Amstal. Residen baru ini tetap menjalankan perintah yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jendral di Batavia, bahkan lebih keras.

Keresahan masyarakat bengkulu di tambah di berlakukannya pajak kepala. Untuk memungut pajak kepala, memanfaatkan sistem pemerintahan yang baru berdasarkan marga, dimana Pasirah bertugas memungut pajak. Dengan adanya pajak kepala ini maka jabatan pasirah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan Belanda saja, sehingga para pasirah merasa tertekan, dengan adanya pajak kepala 1872.

Menurut cerita rakyat Desa Bintunan,²⁶ Countroleur E.E.W. Castens menyampaikan kepada seluruh kepala marga M (pasirah) dalam rapat di Lais, berdasarkan Instruksi asisten Residen A.Van Amstel bahwa pajak kepala harus di kenakan. Mendengar penjelasan Countroleur, pasirah marga Bintunan, Marjati, mengajukan Kebrtan karena hasil panen rakyatnya sejak beberapa tahun terahir menurun. Sanggahan marjati di anggap oleh Control eur marah bahkan berkata bahwa seluruh pasirah dan depati harus mematuhi kebijaksanaan yang telah digariskan.

Pajak kepala walaupun baru diumumkan tetapi, bagi masyarakat akan menyebabkan kemunduran kehidupan rakyat, karena dengan hasil Lada dan Kopi yang berkurang akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kehidupan. Gambaran yang pernah di rasakan sebelumnya terhadap

kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda telah membangkitkan penduduk dari Desa Tanjung Terdana untuk melawan pemerintahan. Perlawanan ini terus berlangsung bahkan mengilhami pada kepala marga (Pasirah) dan kepala desa (Depati) yang berada di Onderafdeeling Lais untuk melakukan usaha yang sama seperti yang di lakukan Oleh Berniat dan Meradayana dari Tanjung Terdana.

Setelah pulang dari rapat dengan Countroleur Casten, pikiran Marjati tidsk tenang. Sejak peristiwa di Lais tersebut, keinginan untuk melawan kebijaksanaan pemerintahan semakin nyata. Untuk itu Marjati mencari dukungan terhadap para Depati yang ada di Lais dengan mengadakan rapat di kerkap. Dalam rapat tersebut para Depati menolak semua perintah Asisten Residen Van Amstel. Untuk menghentikan semua perintah tersebut maka Asisten residen van Amstel harus di bunuh.

Menurut tradisi Lisan²⁷ yang terdapat di marga Bintunan dan Kerkaf untuk melaksanakan tujuan tersebut maka semua Pasirah dan Depati di Onderafdeeling Lais mengadakan rapat untuk membahas usaha yang akan dilakukan untuk menghentikan pembayaran pajak kepala di kerkap. Dalam rapat ini timbul pertentangan antara setuju dan yang tidak tentang usaha untuk melawan secara terbuka terhadap kebijaksanaan pemerintahan Belanda yang baru, yaitu pajak Kepala. Pertentangan ini antara dusun Badil dengan Dusun Samban daei Marga Bintunan, merupakan sisi lain dari meletusnya perang yang terjadi di daerah Lais, dan Pembunuhan Asisten Residen

van Amstel. Pertentangan ini sebenarnya telah lama berlangsung karna orang dari Badil Menginginkan dari kalangan Mereka di pilih sebagai pasirah, karena selama ini yang menajaadi Parah adalah penduduk dari Dusun Samban. Akibat dari pertentangan ini Depati Badil menolak untuk ikut seta dalam pembunuhan yang akan di lakukan.²⁸

Rapat ini juga memilih seorang pemimpin yang akan memimpin usaha perlawanan terbuka yang telah di sepakati. Pemimpin yang di pilih adalah Marjati, seorang Pasirah dari Marga Bintunan. Setelah ada pemimpin, kemudian di tetapkan pembunuhan akan dilakukan di air Bintunan ketika Asisten Residen Van Amstel dan Countroleur Lain Casten, akan menyeberangi sungai dalam perjalanan ke Muko-muko.

1.5 Pembunuhan Asisten Residen Van Amstel

Pada tanggal 1 September 1873, Asisten Residen memulai perjalanan pemeriksaan ke Lais dan Muko-muko. Perjalanan inspeksi ini memang dilakukan oleh setiap Asisten Residen untuk melihat keadaan di Onderafdeeling lain. Berita tentang kedatangan Asisten Residen van Amstel di Lais, diterima oleh Marjati di Bintunan, melalui seorang pesuruh ini datang ke Marjati untuk mengabarkan bahwa Marjati diminta untuk menjemput Asisten Residen, bila memasuki wilayah Marga Bintunan.

Mendengar berita kedatangan Asisten Residen ke Bintunan, merupakan kesempatan untuk melakukan pembunuhan terhadap Asisten Residen yang selam ini menjadi tujuannya akan tercapai. Maka pada tanggal 2 September 1873, 30 Pasirah dan Depati telah

berkumpul di Bintunan, di rumah Pasirah Marjati, untuk menyambut rombongan Asisten Residen H. van Amstel dan Controleur Lais c. Casten, persiapan secara adat telah disiapkan, kedatangan dalam perjalanan Asisten Residen ke Muko-muko.

Ketika menyemberang sungai, keadaan tenang saja, akan tetapi setelah hampir sampai ke tepi mendadak Pasirah Marjati membunuh Asisten Residen van Amstel, dan Controleur Castens. Sedangkan di tepi telah menunggu lebih kurang 30 Depati dan Pasirah yang semuanya bersenjata golok.²⁹ Peristiwa pembunuhan Asisten Residen dilakukan pada pagi hari, pada pukul 10.00 pagi.³⁰

Pembunuh terhadap Asisten Residen van Amstel dan Controleur Casten, merupakan perlawanan dari para Pasirah dan Depati di dalam melawan kebijaksanaan pajak kepala dan perubahan sistem pemerintahan Belanda merubah sistem yang telah ada dengan sistem marga pada tahun 1861.³¹

2. Tindakan Pemerintahan Belanda Selanjutnya

Berita tentang pembunuhan Asisten Residen van Amstel dan Controleur Casten diterima oleh pejabat Belanda di Bengkulu tanggal 3 September 1873. Pemberitaan tentang Asisten Residendi kirim oleh Poshouder di ketaun, laporan ini diteruskan ke Batavia.³²

Setelah menerima kabar dari Ketaun, Pasukan Belanda dengan kekuatan 40 serdadu menuju Bintunan. Selain itu Pasukan Belanda yang berada di Ketaun menyusuri pantai untuk ke Bintunan. Selain itu pasukan Belanda yang berada di Ketaun menyusuri pantai untuk berkumpul di Lais, guna

mempersiapkan penyerangan ke Bintunan. Penyerangan ini akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemerintahan pusat di Batavia.

Telegram yang di kirim dari Bengkulu tanggal 3 September di terima di Batavia hari itu juga. Mengenai masalah pembunuhan Asisten Residen van Amstel dan Controleur Casten., Direktur van het Binnen lansch Bestuur mengirim surat kepada Departement van Oorlog³³. Setelah Gubernur Jendral menerima surat dari Bengkulu, pemerintah pusat memutuskan akan mengirimkan pasukan untuk membantu memberantas pelaku pemberontakan(Opstand) di Bintunan, Lais.

Selain mendatangkan pasukan dari Batavia, pemerintahan Belanda juga mendatangkan pasukan dari Kepahyang, Tebing Tinggi serta Padang. Pada tanggal 4 September 1873 komandan perang Nederlandsch Indie mengirim seorang komandan serta 50 orang serdadu dari Kepahyang ke Bengkulu. Sedangkan dari Batavia pemerintahan Belanda mengirim kapal Kroonprins der Nederlandsch yang membawa 8 orang perwira, 240 pasukan dari Batalyon invantri ke-10. ³⁴ pengiriman pasukan dari Batavia dilakukan kembali pada tanggal 11 September mengirim kapal vice Residen Prins ke Bengkulu dengan membawa 102 pasukan dari batalyon infantri ke-15, dibawah pimpinan kapten I. T. A. Noman.³⁵

Setelah semua persiapan selesai maka, pasukan Belanda melakukan penyerangan ke Lais, khususnya Bintunan. Penyerangan ini membawa perang antara pendukung Marjati dengan pasukan Belanda, yaitu perang Ratu Samban.

Menurut cerita rakyat desa Samban; sebelum pasukan Belanda mengadakan penyerangan terhadap Bintunan. Penduduk yang berada di sekitar Lais mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pertahanan. Hal ini dilakukan karena para Pasirah dan Depati telah diperhitungkan terlebih dahulu akan tindakan balasan yang akan dilakukan oleh pemerintah Belanda. Persiapan dikoordinir oleh Pasirah dan Depati dari masing-masing dusun, dibawah pengawasan langsung Pasirah Marjati yang mendapat gelar "Ratu Samban". Ratu Samban adalah sebuah gelar yang diberikan kepada pemimpin desa Samban, tempat di mana Pasirah Marjati tinggal. Untuk menghalau masuknya pasukan Belanda ke wilayah Bintunan, di tepi sungai Bintunan di buat kubu pertahanan dari tumpukan rotan sego, yaitu suatu jenis rotan yang besar dan kuat. Untuk mendukung kubu pertahanan diperlukan senjata yang cukup handal bagi masyarakat. Senjata yang dipergunakan adalah golok dan keris, selain itu penduduk Bintunan juga mempunyai sebuah meriam pusaka dari dusun Lubuk Badil yang di beri nama "Puar Lakap".³⁶

2.1 Perang Ratu Samban³⁷

Setelah selesai mempersiapkan pasukannya, Pasirah Marjati membakar semangat para pendukungnya "Lebih Baik Mati Berkalang Tanah Daripada Bercarmin Bangkai". Usaha Pasirah Marjati berguna untuk memperkuat tekad rakyat yang berada di *Onderafdeeling* Lais. Setelah memberikan diadakan pembagian tugas, mulai bersiap-siaplah seluruh pasukan Marjati, setiap pasukan dipimpin oleh Depati.

Tanggal 12 September 1873 pasukan Belanda berangkat menuju Bintunan. Ketika pasukan Belanda tiba di tepi sungai Bintunan mereka kecewa, karena tidak menemukan rakit untuk menyeberang. Ketika pasukan Belanda berkumpul di tepi sungai karena tidak dapat menyeberang, Meriam pusaka "Puar Lakap" yang telah dipersiapkan menembaki pasukan Belanda, akibatnya pasukan Belanda banyak yang mati.

Rakit sebagai alat penyeberangan utama telah di ambil terlebih dahulu pasukan Marjati. Sehingga meriam yang merupakan senjata satu-satunya yang dapat melewati sungai menjadi andalan pasukan Marjati. Penggunaan yang terus-menerus menyebabkan ujung meriam merah membara, akibatnya meriam tidak dapat dipergunakan lagi. Sedangkan kubu pertahanan yang di buat dari rotan cukup untuk mempertahankan serangan senapan yang datang dari pasukan Belanda yang berasal dari seberang sungai (arah selatan sungai Bintunan)

Melihat tembakan meriam dari pasukan Marjati tidak ada lagi komandan pasukan Belanda memerintahkan anak buahnya untuk membuat rakit, yang akan dipergunakan untuk menteberangi sungai Bintunan. Setelah selesai rakit tersebut menyeberangkan pasukan Belanda untuk menyerang pasukan Marjati (Ratu Samban).

Melihat gerak maju pasukan Belanda, Marjati memerintahkan kepada pasukannya untuk mundur ke dalam hutan untuk mengatur strategi gerilya. Perintah mundur di ambil oleh Marjati untuk menjaga agar pasukannya jangan sampai terkena tembakan senapan Belanda. Untuk berhadapan dengan

senapan Marjati memerintahkan agar pasukan Belanda di dalam hutan agar dapat sewaktu-waktu menghilang masuk lebih ke dalam hutan.

Karena sistem peperangan yang dilakukann oleh Marjati banyak pasukan Belanda yang mati terbunuh oleh golok dan keris. Untuk memperkuat pasukan komandan pasukan meminta bantuan ke Fort Marlborough. Setelah bantuan pasukan datang pasukan Belanda mendesak kedudukan pasukan Marjati di hutan. Akibatnya pasukan yang jumlahnya sedikit menjadi terkepung. Pengepungan pasukan Marjati oleh pasukan Belanda dilakukan setelah 15 hari pasukan Belanda menyerang pasukan Marjati.

Melihat pasukannya terkepung, Marjati menyerang pasukan Belanda. Usaha ini dilakukan oleh Marjati untuk membangkitkan semangat pasukannya yang telah terkepung. Usaha Marjati ini menyebabkan dirinya tertembak setelah kekebalan yang ada pada dirinya tidak ada lagi, karena pasukan Belanda menggunakan peluru berlapis emas yang berguna untuk melawan kekebalan tubuh terhadap senjata.

Setelah mengetahui Marjati tertembak, pasukan Marjati kemudian menyerah kepada pasukan pemerintahan Belanda. Setelah itu Depati-depati yang membantu Pasirah Marjati melawan Belanda di tangkap, di angkut ke Fort Marlborough untuk dimasukkan ke dalam penjara, bahkan ada yang di bunuh.

Setelah berhasil menangkap pembunuhan Asisten Residen van Amstel dan *Ontroleur* Casten di Bintunan. Pemerintahan belanda masih dihadapkan oleh munculnya Berniat da Meradaya,

pemimpin pemberontak bulan April 1873.³⁸ Untuk menjaga ketertiban di Bengkulu pasukan yang baru selesai menumpas pemberontakan Marjati diharuskan menumpas Berniat dan Meradaya. Usaha pemerintahan Belanda untuk menangkap Berniat berhasil, ketika datang telegram dari Asisten Residen Bengkulu Loging Tobias kepada *Directeur Binnen landsch Bestuur*, yang menyebutkan telah menerima kabar dari Kontrolleur Kraf dari muara dua .³⁹ ketika pasukan Belanda akan menangkapnya tahun 1875, Berniat melakukan perlawanan namun gagal dan ia sendiri akhirnya gugur.

Dengan terbunuhnya Asisten Residen H. Amstel, dan *controleur* Casten, kabinet di Belanda melalui Suratnya tanggal 20 juli no. 20, menuntut kepada seluruh Masyarakat yang ada di *Onderafdeeling* lais serta *Ommelanden* Bengkulu, agar membayar uang sebesar f.5000 (lima ribu gulden). Uang ini untum membantu keluarga H. Van Amstel dan casten.⁴⁰ Permintaan pemerintah belanda ini di dasarkan bahwa rakyat di *Onderafdeeling* lais dan *Ommelanden* Bengkulu, harus bertanggung jawab atas kematian kedua orang pegawai Belanda tersebut.

Sebagaimana pada masa-masa sebelumnya setiap kebijaksanaan yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda selalu di tolak. Demikian juga dengan kebijaksanaan denda uang. akibatnya sudah dapat kita perkirakan, masyarakat tidak mau membayar, bahkan pemberontakan-pemberontakan kecil terjadi di Bengkulu dan sekitarnya. Gerakan ini terus berlangsung hingga akhir 1870-an.

Gerakan protes ini berhenti setelah pemerintah Belanda menyadari bahwa penduduk di daerah ini dapat di paksa. Selain itu pemerintah Belanda juga berusaha memperhatikan lagi peraturan-peraturan adat yang di berlakukan, seperti misalnya undang-undang simbur cahaya. Dimana undang-undang ini kemudian disesuaikan dengan adat yang ada di masing-masing *Onderafdeeling* penyesuaian undang-undang simbur cahaya di Bengkulu disebabkan di setiap *Onderafdeeling* tidak mempunyai adat yang sama. Untuk itu diperlukan suatu menyelesaikan tentang undang-undang simbur cahaya dengan adat yang ada di setiap *Onderafdeeling* di Bengkulu.

Setelah selesai Ratu Samban, pemerintahan Belanda berusaha untuk mengadakan perdamaian dengan memperhatikan kembali kebijaksanaan yang telah ditetapkan.⁴¹ Untuk lebih menitik beratkan perhatian kedaerah Bengkulu, pemerintahan Belanda merubah stasus Bengkulu dari *Onderafdeeling* menjadi Residensi pada tahun 1878. Setelah mempelajari keadaan di Bengkulu, pemerintah Belanda tahun 1878 berusaha untuk menyesuaikan undang-undang simbur cahaya yang ditetapkan pada tahun 1861 dengan adat yang berlaku di setiap *Onderafdeeling* Bengkulu. Usaha ini baru dapat diselesaikan pada tahun 1910 pada masa Residen O.L. Helfrich.

Pembunuhan yang terjadi Asisten Residen Bengkulu pada tahun 1833-1873, meruoakan suatu protes yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda terlalu menekan rakyat. Selain itu bila kita perhatikan bahwa pembunuhan

yang berhasil, dilakukan ketika Asisten Residen sedang melakukan peninjauan (*tourne*).

Keberhasilah pembunuhan ketika pada saat sedang melakukan *tourne*, disebabkan oleh pasukan yang mengawal Asisten Residan dalam perjalanan tidak terlalu banyak, bila dibandingkan dengan usaha pembunuhan di Fort Marlborough. Karena di Fort Marlborough merupakan tempat berkumpulnya pasukan-pasukan Belanda dan sulit untuk melakukan pembunuhan seperti yang dilakukan oleh Berniat pada tahun 1873, usaha ini mengalami kegagalan.

Sesuatu yang di rasa sangat penting setelah pembunuhan Asisten Residaen van Amster, adalah pernyataan bahwa pemerintahan Belanda berusaha untuk menyelesaikan masalah in dengan jalan damai seperti yang terdapat dalam *Algemeen Administratief Versag over het jaar 1874-1875*. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Belanda mengaitkan antara pembunuhan yang terjadi dengan kebijaksanaan pemerintah di Bengkulu.

Hubungan antara pembunuhan dengan kebijaksanaan pemerintah telah terlihat pada tahun 1862, ketika ditetapkan undang-undang simbur cahaya, di mana rakyat mengadakan protes terhadap Asisten Residan, bahkan protes ini terus berlarut-larut hingga tahun 1869, tetapi masalah ini belum yang tuntas karena masih mendapat tanggapan dari pemuka adat di Bengkulu. Masalah ini belum sekesai, pemerintah Belanda telah memberlakukan kembali kebijaksanaan baru, yaitu pajak kepala. Pajak kepala dikenakan pada saat ekonomi masyarakat mengalami kemunduran, yang menyebabkan terjadinya untuk membayar

pajak, seperti terlihat pada penduduk Tanjung Terdana yang dipimpin oleh Burniat dan Merdayan kedua masalah ini menyebabkan para pemberontak, dalam usaha untuk menakhiri pemberontakan yang terjadi di Bengkulu.

Kesimpulan

Perjuangan rakyat Bengkulu terhadap kolonialisme barat tahun 1800-1873, yang berupa pembunuhan terhadap penguasa Kolonial di Bengkulu ditentukan oleh banyak faktor, seperti perkembangan ekonomi, sosial budaya dan politik. Bila ditinjau dari fenomena sosial maka pembunuhan tersebut merupakan suatu gerakan sosial. Fenomena-fenomena sosial memperlihatkan adanya interaksi di antara faktor-faktor itu telah mempercepat semacam dorongan untuk mengadakan pembunuhan. Seperti telah ditunjukkan, usaha untuk meniadakan hal-hal yang dirasakan terlalu menekan Rakyat, adalah dengan usaha pembunuhan.

Telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial-budaya di Bengkulu. Perubahan sosial dimulai pada awal abad ke-19, ketika Inggris memberlakukan tanam paksa lada di Bengkulu pada tahun 1802. Kebijakan tanam paksa lada ini membawa pengaruh yang kurang baik terhadap hubungan antara penguasa Sungai Itam dengan rakyatnya, di mana rakyat Sungai Itam tidak mau melaksanakan perintah Residen Inggris (Ewer). Hubungan yang kurang baik ini disebabkan oleh pangeran Sungai Itam melihat bahwa penghasilan pangeran Sungai Lemau dari sistem tanam paksa lebih baik. Rasa iri menyebabkan pangeran Sungai Itam meminta bantuan

kepada pemerintah Inggris untuk membantu dalam pemaksaan penanam kopi pada tahun 1805. Perubahan wajib tanam setelah Residen yang baru yaitu Parr, memperoleh keterangan dari pangeran Sungai Itam tentang keengganan rakyatnya untuk menanam lada.

Hubungan kurang baik antara Raja dan rakyatnya juga di khawatirkan oleh pangeran Sungai Lemau, hal ini berdasarkan atas pengangkatan Perreau sebagai pengawas tanam paksa. Dengan adanya pengawasan ini, maka hubungan antara raja dan rakyatnya dapat bertambah longgar dan menyebabkan Wibawa raja akan berkurang, karena yang selalu berhubungan dengan rakyat adalah raja, setelah adanya pengawasan perkebunan (Perreau) maka rakyat kurang mendapatkan perhatian dari raja. Dengan demikian pangeran akan mengalami "pengasingan" dari rakyatnya.

Perubahan-perubahan selanjutnya terjadi pada tahun 1818, ketika Raffles menjadi Letnan Gubernur Bengkulu. Usaha yang dilakukan oleh Raffles di Bengkulu adalah mengadakan perjanjian dengan pangeran Sungai Itam, pangeran Sungai Lemau dan pangeran Silebar. Perjanjian ini merupakan usaha dari pemerintah Inggris untuk mendapatkan ketiga wilayah yang dikuasai oleh Pangeran, sebagai imbalan melepaskan hak *Privelese*, ketiga pangeran mendapat gaji dari pemerintah Inggris. Selain itu Raffles juga mengadakan pembaruan dalam bidang tanam paksa, yaitu dengan menghapuskan sistem tanam paksa.

Setelah Bengkulu diserahkan kepada Belanda tahun 1825, sebagai akibat perjanjian London 1824, tanam paksa

dilakukan kembali pada tahun 1833 pada masa Asisten Residen Knoerle, perubahan yang lain menyangkut masalah pemerintahan tradisional dimana Knoerle berusaha untuk mengakhiri keturunan dari kerajaan Sungai Itam, ketika Pangeran Linggang Alam meninggal dunia tahun 1833, Asisten Residen Knoerle berusaha untuk mengakhiri kerajaan ini dengan jalan mengasingkan anak raja ke Jawa. Kedua kebijakan Knoerle menyebabkan dirinya terbunuh ketika sedang melakukan inspeksi ke dusun Tajuang pertengahan tahun 1833. Setelah pembunuhan Asisten Residen Knoerle, pemerintah Belanda melakukan perubahan tentang wajib tanam bagi masyarakat, yaitu 500 pohon lada dari seribu pohon yang ditetapkan.

Usaha untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan pada tingkat desa, dilakukan oleh pemerintahan Belanda setelah menghapus kerajaan Sungai Lemau 1861. Langkah pertama yang dilakukan pemerintahan Belanda adalah membagi *Onderafdeeling* Lais (sebelumnya termasuk wilayah Sungai Lemau dengan 5 distrik) menjadi 5 marga. Pembagian ini bertujuan untuk menyamakan dengan sistem pemerintahan yang telah ada di Karesidenan Palembang, karena sejak 1839 Bengkulu masuk kedalam Karesidenan Palembang. Penghapusan kerajaan berikutnya adalah kerajaan Sungai Itam (1863) dan kerajaan anak Sungai Tahu 1870.

Setelah pembentukan pemerintahan marga, pemerintahan Belanda berusaha melakukan Undang-undang Simbur Cahaya di Bengkulu, yaitu undang-undang yang ditemukan untuk wilayah Palembang yang mengatur sistem pemerintahan marga, akan tetapi isi dari

undang-undang ini banyak yang tidak sesuai dengan adat yang ada di Bengkulu. Akibatnya terjadi penolakan untuk mempergunakan undang-undang Simbur Cahaya. Penolakan yang terjadi di coba untuk di selesaikan oleh Pruys van Der Hoven, ketika menjabat Asisten Residen setelah Wallano (Asisten Residen yang memberlakukan sistem pemerintahan marga dan undang-undang Simbur Cahaya).

Setelah memperbaiki sistem pemerintahan desa dan memberlakukan undang-undang Simbur Cahaya di Bengkulu, pemerintahan Belanda masih menghadapi masalah keuangan sebagai akibat dari berkurangnya pemasukan dari hasil lada dan kopi. Untuk mengatasi masalah menurunnya hasil lada dan kopi, pemerintahan Belanda menghentikan tanam paksa di Bengkulu pada tahun 1868. Sebagai gantinya pada tahun 1872 ditetapkan pajak baru, yaitu pajak kepada dalam bentuk uang. Pajak kepala ini mulai berlaku pada tahun 1873. Penarikan pajak dilakukan oleh kepala marga (pasirah) sebagai aparat pemerintahan sebagai akibat dari pembentukan sistem pemerintahan baru setelah kerajaan di hapuskan. Dalam kasus ini pasirah memainkan peranan yang saling bertentangan, antara harus melindungi rakyatnya dan sebagai pegawai pemerintah. Hal ini lah yang menyadarkan marjati.

Sebelum pemerintahan desa dimasukkan ke Hirarki pemerintahan kolonial, pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang otonom, dimana para Pasirah (sebelumnya Depati) mempunyai hak untuk mengatur sendiri keadaan desanya serta mengolah penghasilan yang

di peroleh. Perubahan sistem pemerintahan desa merupakan penetrasi Administrasi kolonial yang bersipat Legal rasional, mengakibatkan semakin terdesaknya lembaga politik tradisional dan merong rong kedudukan politik tradisional dan pada gilirannya menimbulkan ketegangan dan pertentangan. Dengan runtuhnya bangunan tradisionalsebagai akibat adanya gagasan baru dalam kehidupan sosial, timbullah keguncangan Norma-norma lama serta prustasi dikalangan rakyat pedesaan. Dalam menghadapi pengaruh penetrasi kebudayaan Barat. Yang membawa akibat desintegrasi sosial semacam itu, maka Pasirah melakukan reaksi dalam bentuk gerakan sosial. Gerakan sosial yang dilakukan oleh para pasirah bersama- sama dengan Depati adalah membunuh Asisten Residen Van Amstel di bintunan 2 September 1873.

Usaha pemerintahan Belanda untuk memahami sistem pemerintahan yang ada di Bengkulu, sebagai tujuan untuk menguasai Bengkulu sejak tahun 1825 hingga 1878 merupakan fase konsolidasi (masa campur tangan). Pase ini dianggap penting dalam usaha untuk memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya yang ada di Bengkulu. Akhirnya pemerintahan Belanda dalam menjalankan pemerintahan di Bengkulu selalu menyesuaikan dengan budaya yang ada.

Salah satu masalah yang berkaitan langsung dengan pembunuhan Asisten Residen adalah segi natifisme, yaitu usaha untuk menghidupkan kembali aspek-aspek tradisional yang pernah ada seperti wewenang desa untuk mengatur dirinya sendiri.

Jika di dibandingkan dengan ciri gerakan sosial yang ada di wilayah lainnya di Indonesia. Gerakan sosial yang ada di Bengkulu mempunyai ciri yang khas yaitu, pembunuhan. Sedangkan wilayah-wilayah lai di Indonesia (jawa khususnya) kebanyakan adalah pemberontakan, misalnya pemberontakan petani. Memang pemberontakan petani hampir terjadi di seluruh Jawa. Adapun aspek yang mempengaruhi pemberontakan di Jawa selama abad ke 19 adalah Ratu Adil. Ciri khas yang terdapat di Jawa dan Bengkulu, mumngkin dapat dibuat suatu "Studi perbandingan" anatara gerakan sosial di jawa dan Bengkulu.

Akhirnya, uraian dan tafsiran serta kesimpulan yang telah di berikan, belumlah merupakan hasil yang mutlak untuk menjelaskan perubahan sosial, keadaan masyarakat bengkulu pada abad ke 19. Untuk itu masih di perlukan penelitian-penelitian lanjutan yang dapat memberikan masukan-masukan baru, tentang sejarah sosial di Bengkulu. Karena studi tentang gerakan-gerakan sosial yang ada di luar Jawa akan menambah Dimensi Historiografi di Indonesia.

Referensi

¹Gerakan sosial adalah suatu gerakan protes yang di lakukan oleh penduduk terhadap masuknya pemilikan dan pembagian kekuasaan ; Lihat David L. Sills (ed), *International Encyclopidia of the social sciences vol 14*, 1972, hal 72

²Prof. Dr. H. Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta, 1980, hal 86; *Encyclopedie Van Ned. Indie I*, hal. 176.

³Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Histografi Indonesia: suatu Alternatif*, Jakarta: Gramedia, 1982, hal. 208.

⁴Adatrechbunde1 XXII, 1922, hal 319, Op-Cit, hal 85.

⁵Wink. P., *De Onderafdeeling Lais in de Residentie Bengkoeloe*, s Hage: M.Nijhoof 1926, hal 88.

⁶Prof. Dr.H. Abdullah Siddik, Op-Cit, hal 35

⁷Taufik Abdullah, "The making of a Schakel Society: The Minangkabau Region in the late 19th Century", *Indonesian Journal of Cultural Studeis* VI/3, Agustus 1976, Hal 13-30

⁸Adatrechbundel XXVII, 1922, hal.93

⁹Well, loc. Cit, hal. 256.

¹⁰Wells, Ibid. , hal. 258.

¹¹SFR 24, 5 januari 1808, 12 januari 1808.

¹²Wells, Loc.Cit, hal. 257 cat. 61.

¹³"Tambo Bengkulu".

¹⁴ Wells, Loc.cit, hal. 256

¹⁵Arsip Nasional, laporan politik tahun 1833, jakarta, 1971, hal. 20

¹⁶Kielstra, Loc. Cit., hal. 1215

¹⁷Ibid., hal. 1220-1221

¹⁸Wink, "De Ontwikkeling der Inheemsche Rechts praak in het Gewest Benkoelen", TBG 69, 1929, hal. 33

¹⁹Tambo Bengkulu

²⁰Lihat Algemeen Administratief Versag over het jaar 1873.

²¹Lihat Algemeen Administratief Versag over het jaar 1874-1875.

²²Lihat juga Dep. P dan K. Cerita rakyat Daerah Bengkulu, Jakarta 1982, hal. 15-53.

²³Algemeen Administratief Versag over het jaar 1874-1875.

²⁴Dep. P dan K, Op. Cit., hal. 45-53.

²⁵Lihat Algemeen Administratief Versag over het jaar 1874 hingga 1876.

²⁶Herman Suryadi dan Nazaruddin, "Perlawanan Ratu Samban".

²⁷Wawancara dengan Penilik Kebudayaan Kecamatan Lais, bapak Hamidin dan bapak Basrin, expasirah (Kepala Marga) Bintunan di desa Batik Nau.

²⁸Wuisman, Op-Cit, hal. 117

²⁹Wink. Op-cit, hsl. 89; Politiek Verslag 1873. Administratief Versag over het jaar 1873.

³⁰Telegram dari Posthouder Ketahun. Ag. 20. 199/73 tanggal 3 September 1873.

³¹Pembagian Lais menjadi Marga

³²Ag. 20. 199/73 tanggal 3 September 1873.

³³Ag. No. 1924.

³⁴Ag. 17541 tanggal 6-9-1873

³⁵Ag. No. 3188/6.

³⁶ Herman Suryadi dan Nazarudin, Log-Cit

³⁷Sumber mengenai perang Ratu Samban berdasarkan Cerita Rakyat; berupa naskah yang disusun oleh Herman Suryadi dan Nazarudin, wawancara dengan eks Pasirah Bintunan di Batik Nau dan Cerita Rakyat terbitan P dan K, penggunaan sumber lokal disebabkan oleh sumber Belanda di Arsip Nasional belum di temukan.

Mungkin dakam penelitian lebih lanjut akan ditemukan sumber-sumber Belanda tentang perang Ratu Samban ini.

³⁸*Algemeen Administratief verslag over het jaar 1874 dan 1875*

³⁹Telegram N0. 167, Ex, B. B. 12. 10-74-9971.

⁴⁰Lihat surat *Ministerie van Kolonien* kepada Gubernur Jenderal; B:6/10 74-33

⁴¹Lihat *Algemeo Administratief verslag over het jaar 1874-1875*